

|                                                                                   |                                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>News Title :</b> Bursa Kripto Indonesia Dirilis Paling Lambat Juni 2023 |                                  |
|                                                                                   | <b>Media Name :</b> Suara.com                                              | <b>Journalist :</b> M Nurhadi    |
|                                                                                   | <b>Publish Date :</b> 20 January 2023                                      | <b>Tonality :</b> Positive       |
|                                                                                   | <b>News Page :</b>                                                         | <b>News Value :</b> 0            |
|                                                                                   | <b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)                | <b>Ads Value :</b> 0             |
|                                                                                   | <b>Section/Rubrication :</b> Bisnis                                        | <b>Topic :</b> Bursa Aset Kripto |

## Bursa Kripto Indonesia Dirilis Paling Lambat Juni 2023

M Nurhadi

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:46 WIB



Ilustrasi Koin Mata Uang Kripto. (Unsplash)

Suara.com - Bursa **kripto** paling lambat akan diluncurkan pada Juni tahun 2023 ini. "**Bursa kripto** harus segera terbentuk dan Pak Menteri (Zulkfli Hasan) tenggat waktunya adalah Juni 2023," ujar Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Didid Noordiatmoko dalam Perumusan Rapat Kerja Buppebti di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Hadirnya bursa kripto diharapkan mampu memenuhi kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa itu sendiri.

Menurut Didid, pembentukan bursa kripto juga akan membuka perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan.

"Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja," kata Didid, dikutip dari Antara.

Baca Juga:

**Baru IPO, Saham Emiten Outsourcing Ini Gandeng OJK Perluas Ekspansi Bisnis**

Tidak hanya itu, Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**).

RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan.

"Jadi kita akan bersama Kemenkeu akan menyusun RPP itu, kemudian butir-butir yang akan dimasukkan ke dalam RPP terkait dengan mekanisme pemindahannya, mekanisme kerjasama dan sinergitas antara Bappebti, Kementerian Keuangan kemudian berikutnya adalah terkait dengan koordinasi kebijakan," kata Didid.

Dengan pengalihan aset kripto di bawah pengawasan OJK, maka kebijakan-kebijakan terkait aset digital menjadi wewenang Bappebti. Sementara itu, bagian operasional menjadi tanggung jawab OJK.

Didid melanjutkan, terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bappebti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi.

Baca Juga:

**Bitcoin dan Ethereum Jadi Kripto Paling Dipercaya Investor Indonesia**

Upaya ini meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi (PDK).

"Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan-pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggannya udah cukup banyak," pungkash Didid.